

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah kenakalan remaja yang semakin meningkat.

Masalah kenakalan remaja di Indonesia telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Tindakan-tindakan remaja yang

menyimpang tersebut telah mengarah ke tindakan kriminal yang melanggar hukum. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakkan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dan pembinaan, penciptaan, dan keluarga di dalam menunjang hal ini.

Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras juga dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup

memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Contohnya di kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, kenakalan remaja semakin meningkat meskipun aparat kepolisian sudah melakukan berbagai macam upaya

pengecahan dan penggulungan kenakalan remaja. bentuk kenakalan yang paling dominan adalah tawuran antar remaja. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari salah seorang warga, sekitar tahun 2000 terjadi tawuran remaja, korban luka berat sejumlah 5 orang dan menyebabkan 2 buah rumah penduduk rusak ringan. Tahun 2011, juga terjadi hal serupa yang menyebabkan 13 orang korban luka berat. 3 buah rumah penduduk juga rusak ringan, serta kendaraan bermotor. Sampai saat ini hal-hal serupa masih sering terjadi meski seharusnya tidak terjadi lagi sebab sangat merugikan, baik dikalangan remaja maupun dikalangan masyarakat umum dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk memformulasikan dalam judul: **"Peran Kepolisian Dalam Pembinaan Remaja Studi Kasus Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Sikap atau perilaku remaja benar-benar telah menyimpang dari sikap remaja yang sesungguhnya, sehingga kenakalan remaja mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat Khususnya masyarakat kec. Moutong.
2. Factor apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam pembinaan remaja di Kecamatan Moutong.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarahkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran kepolisian dalam melaksanakan pembinaan terhadap remaja di Kecamatan Moutong ?
2. Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam melaksanakan pembinaan terhadap remaja di Kecamatan Moutong ?
3. Bagaimana dampak peran Kepolisian dalam melakukan pembinaan remaja di Kecamatan Moutong ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam memberikan pembinaan terhadap remaja di Kecamatan Moutong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya kenakalan remaja di Kecamatan Moutong.
3. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Kecamatan Moutong dalam menanggulangi kenakalan remaja.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dalam bidang keilmuan, penulisan ini merupakan studi komparasi antara berbagai teori yang dikaji secara ilmiah, dalam mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan

dasar acuan penelitian lain, khususnya penelitian mengenai peran kepolisian dalam pembinaan remaja.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis bertujuan untuk memecahkan masalah, yang berupa solusi untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi dalam memberikan solusi kenakalan remaja, khususnya remaja di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.
2. Secara keseluruhan hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai tambahan kajian dan bahan perbandingan pemikiran oleh mahasiswa terhadap pihak lembaga atau pemerintah dalam memberikan solusi kenakalan remaja.